



Kebijakan dan Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Umayyah

Firyal Jilan Nuha¹, Hikmal Azkia Muharam², Nazmi Ibnu Shina Zein³, Lina Marlina⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

Korespondensi penulis: firyaljn4@gmail.com

Abstract. *This study explores the development of Islamic economic thought during the Umayyad Dynasty (661-750 CE). Using descriptive and literature review methods, this research highlights the integration of Islamic principles into economic policies and practices during this era. Key findings indicate that the Umayyad rulers implemented zakat, kharaj, and jizyah systems to ensure wealth redistribution and welfare. Infrastructure development and monetization through dinar and dirham currencies also contributed to economic stability while adhering to Islamic ethical values. Despite challenges such as social inequality and administrative inefficiencies, the Umayyad Dynasty laid a foundation for future Islamic economic systems that prioritize justice and prosperity.*

Keywords: *Islamic Economics, Umayyad Dynasty, Zakat, Kharaj, Economic Policies.*

Abstrak. Studi ini mengeksplorasi perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama Dinasti Umayyah (661-750 M). Dengan menggunakan metode deskriptif dan tinjauan literatur, penelitian ini menyoroti integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi selama era ini. Temuan utama menunjukkan bahwa penguasa Umayyah menerapkan sistem zakat, kharaj, dan jizyah untuk memastikan redistribusi kekayaan dan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur dan monetisasi melalui mata uang dinar dan dirham juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai etika Islam. Terlepas dari tantangan seperti ketidaksetaraan sosial dan inefisiensi administrasi, Dinasti Umayyah meletakkan dasar untuk sistem ekonomi Islam masa depan yang memprioritaskan keadilan dan kemakmuran.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Dinasti Umayyah, Zakat, Kharaj, Kebijakan Ekonomi.

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi merupakan faktor fundamental dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Kondisi ekonomi yang baik memungkinkan pelaksanaan rencana pembangunan secara optimal, sementara ekonomi yang melemah dapat menghambat kemajuan berbagai sektor. Dalam sejarah peradaban Islam, Dinasti Umayyah (661-750 M) menjadi salah satu periode penting yang menandai perkembangan signifikan dalam sistem ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam.

Dinasti Umayyah didirikan ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengambil alih jabatan khalifah dari Ali bin Abdul Thalib pada tahun 661 M. Periode ini menandai transisi penting dari sistem khilafah yang relatif demokratis pada masa Khulafaur Rasyidin menuju sistem monarki hereditas. Meskipun perubahan sistem pemerintahan ini, Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dan mengembangkan berbagai aspek peradaban, termasuk ekonomi.

Selama hampir 90 tahun pemerintahannya, Dinasti Umayyah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan kebijakan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan administratif imperium yang luas. Pada masa pemerintahan Abdul Malik

bin Marwan, misalnya, terjadi pertumbuhan pesat dalam perdagangan, pengelolaan keuangan negara yang tertib, serta terjaminnya ketertiban dan keamanan, yang secara kolektif mendorong kemakmuran rakyat.

Studi tentang ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan dalam konteks pemerintahan yang kompleks dan multikultural. Selain itu, mengkaji pemikiran ekonomi pada masa kejayaan Islam dapat memberikan wawasan berharga dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam kontemporer yang relevan dengan tantangan global saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah, dengan fokus pada institusi fiskal, kebijakan moneter, perdagangan, dan kontribusi para tokoh pemikir ekonomi pada masa tersebut. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif tentang fondasi-fondasi sistem ekonomi Islam yang dikembangkan pada masa Dinasti Umayyah dan relevansinya dengan pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah berkembang berdasarkan prinsip-prinsip fundamental Al-Qur'an dan Hadis. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa ini mencerminkan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan distributif dan kesejahteraan sosial yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Beberapa instrumen ekonomi penting yang dikembangkan pada masa ini meliputi:

Zakat

Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Pada masa Dinasti Umayyah, khususnya selama pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat mengalami kemajuan signifikan dengan pengembangan sistem administrasi yang lebih efektif. Umar bin Abdul Aziz dikenal karena keberhasilannya dalam mengelola zakat sehingga sulit menemukan mustahik (penerima zakat) pada masanya, yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Kharaj dan Jizyah

Kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak untuk non-Muslim) menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintahan Umayyah. Sistem perpajakan ini dirancang sesuai dengan prinsip keadilan, di mana besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar. Meskipun demikian, implementasi sistem ini terkadang menimbulkan ketegangan sosial, terutama ketika penerapannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang diajarkan Islam.

Sistem Moneter

Pada masa Abdul Malik bin Marwan, terjadi reformasi moneter signifikan dengan penerbitan mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) dengan desain Islami dan tulisan dalam aksara Kufi. Standardisasi mata uang ini memperkuat identitas ekonomi Islam dan memfasilitasi perdagangan di seluruh wilayah kekuasaan Umayyah.

Baitul Mal

Lembaga Baitul Mal mengalami perkembangan struktural pada masa Dinasti Umayyah, dengan pemisahan fungsi administratif dan pengelolaan keuangan negara yang lebih terorganisir. Meskipun terjadi beberapa penyimpangan dalam praktiknya, terutama ketika dana publik digunakan untuk kepentingan keluarga kerajaan, institusi ini tetap menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara.

Perdagangan dan Infrastruktur

Dinasti Umayyah memberikan perhatian besar pada pengembangan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi, termasuk pembangunan jalan, sistem irigasi, dan fasilitas publik. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan perdagangan domestik dan internasional, dengan rute perdagangan yang meluas hingga Cina dan India.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Dinasti Umayyah, meskipun tidak selalu konsisten dalam implementasinya, telah meletakkan dasar penting bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang lebih kompleks pada masa-masa berikutnya. Aravik dan Tohir (2020) mengidentifikasi kontribusi signifikan Dinasti Umayyah dalam pengembangan sistem perdagangan dan fiskal, sementara Huda (2021) menekankan pentingnya reformasi administrasi ekonomi yang dilakukan pada masa ini. Penelitian ini akan memperluas analisis tersebut dengan mengeksplorasi lebih dalam tentang kebijakan ekonomi spesifik dan kontribusi tokoh-tokoh pemikir ekonomi pada masa Dinasti Umayyah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis kebijakan ekonomi Dinasti Umayyah. Rancangan kegiatan penelitian dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis meliputi identifikasi, pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data dari sumber-sumber primer dan sekunder. Objek penelitian mencakup seluruh kebijakan ekonomi era Dinasti Umayyah (661-750 M), dengan fokus pada sistem perpajakan, pengelolaan Baitul Mal, kebijakan moneter, regulasi perdagangan, dan pengelolaan tanah.

Bahan utama penelitian berupa kitab-kitab sejarah Islam klasik, manuskrip pemerintahan Umayyah, serta literatur kontemporer tentang ekonomi Islam yang diakses dari perpustakaan universitas dan basis data digital akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi menyeluruh dengan teknik penelusuran literatur sistematis dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas informasi.

Variabel penelitian didefinisikan secara operasional meliputi kebijakan ekonomi sebagai keputusan pemerintahan Umayyah dalam pengaturan aktivitas ekonomi, sistem perpajakan (kharaj, jizyah, ushr, zakat), struktur pengelolaan Baitul Mal, kebijakan moneter terkait standardisasi mata uang, regulasi perdagangan, serta sistem pengelolaan tanah.

Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama, analisis historis untuk memahami konteks, analisis komparatif untuk membandingkan dengan kebijakan ekonomi pada masa sebelumnya dan prinsip ekonomi Islam, serta sintesis untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang karakteristik dan implikasi kebijakan ekonomi Dinasti Umayyah terhadap pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pemerintahan Bani Umayyah

Dinasti Bani Umayyah dimulai pada tahun 661 M ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengambil alih jabatan khalifah setelah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berakhir. Transisi ini menandai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Islam, dari model yang relatif demokratis menjadi sistem monarki hereditas. Mu'awiyah, yang sebelumnya menjadi gubernur provinsi Syam pada masa Khalifah Umar, dikenal sebagai pemimpin dan administrator yang cerdas.

Kekhalifahan Umayyah memerintah dari tahun 661 hingga 750 M di wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari tahun 756 hingga 1031 M di Kordoba, Spanyol. Dinasti ini dinamai berdasarkan Umayyah bin 'Abd Ash-Shams, kakek buyut dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Perebutan kekuasaan dengan pendukung Ali bin Abi Thalib menyebabkan terjadinya Perang Siffin, yang pada akhirnya memperkuat posisi Mu'awiyah sebagai khalifah pertama Dinasti Umayyah.

Kebijakan Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kebijakan yang berpihak kepada rakyat berhasil menghilangkan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata (ROFIQO and RIZAL 2019).

1. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Selama pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-705 M), Dinasti Umayyiah mengalami periode stabilitas yang relatif panjang. Stabilitas ini mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi yang signifikan, termasuk pembangunan jalan, sistem irigasi, dan fasilitas publik seperti Kubah Batu (Qubba al-Sahra) di Yerusalem. Investasi infrastruktur ini mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan industri, yang pada gilirannya meningkatkan perdagangan dengan wilayah-wilayah seperti India dan Asia Tenggara.

Reformasi fiskal penting lainnya termasuk:

1. **Standardisasi Mata Uang:** Pada tahun 77 H/697 M, Abdul Malik bin Marwan menerbitkan dinar emas dan dirham perak dengan desain Islami dan tulisan dalam aksara Kufi. Reformasi moneter ini menggantikan penggunaan mata uang Bizantium dan Persia, memperkuat identitas ekonomi Islam dan menstabilkan sistem moneter.
2. **Sistem Perpajakan:** Selama masa Dinasti Umayyiah, sistem perpajakan mengalami beberapa modifikasi. Pajak tanah (kharaj) dikenakan pada semua pemilik tanah, baik Muslim maupun non-Muslim, sementara jizyah (pajak kepala) hanya dikenakan pada non-Muslim. Kebijakan ini, meskipun menghasilkan pendapatan signifikan bagi negara, menyebabkan banyak non-Muslim masuk Islam untuk menghindari beban pajak, yang pada akhirnya mengurangi pendapatan negara.

2. Reformasi Administratif dan Institusional

Mu'awiyah bin Abi Sufyan memperkenalkan beberapa inovasi administrative, Era Umayyiah ditandai dengan keberhasilan dalam membangun kerajaan yang kuat dan makmur di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah seperti Muawiyah bin Abi Sufyan (Saputra 2025), yang mempengaruhi pengelolaan ekonomi negara:

1. **Diwan (Kantor Catatan):** Pendirian kantor catatan pemerintahan memperkuat fungsi pencatatan keuangan negara dan meningkatkan transparansi.
2. **Diwan Al-Barid (Layanan Pos):** Pengembangan sistem pos mempermudah komunikasi bisnis dan perdagangan di seluruh wilayah kekuasaan Umayyiah.
3. **Pengembangan Maritim:** Mu'awiyah memperkuat angkatan laut Islam dan mengembangkan galangan kapal di beberapa wilayah strategis, yang mendukung ekspansi perdagangan maritim hingga India dan Cina.

Kemampuan administrasi Mu'awiyah terbukti saat dia memimpin Suriah. Ia membuat sistem perpajakan yang efektif dan adil, yang memungkinkan pendapatan yang stabil untuk membantu pemerintah dan militer (Maulidan et al. 2024). Selain itu, Muawiyah juga menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara

profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik (Lisa Aminatul Mukaromah 2020).

3. Konsep Negara Kesejahteraan

Puncak kebijakan ekonomi Bani Umayyah terjadi selama pemerintahan singkat Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), yang menerapkan konsep negara kesejahteraan. Kebijakannya meliputi:

1. **Reformasi Zakat:** Pengelolaan zakat yang efektif menghasilkan tingkat kesejahteraan yang tinggi, hingga sulit menemukan mustahik di beberapa wilayah. Umar menyadari bahwa zakat merupakan sebuah instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (growth dan equity). Dari sinilah terlihat konsep demokrasi ekonomi Umar yang tidak harus diartikan sebagai berlakunya prinsip equal treatment (perlakuan sama), tetapi ada orang yang tidak mempunyai perlu memperoleh pemihakan dan bantuan yang berbeda (Ruslan and Marasabessy 2017). Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan kemakmuran warganya sehingga tidak ada yang berhak menerima zakat. Abdul Malik bin Marwan terkenal dengan pencetakan koin dinar dirham sebagai mata uang Islam sehingga menjadikan negara mandiri dari ketergantungan pada Romawi dan Persi (Kirani, Firmansyah, and Mariyah 2023).
2. **Reformasi Jizyah:** Pengurangan jumlah jizyah yang harus dibayar oleh non-Muslim, memperbaiki keadilan sistem perpajakan.
3. **Kebijakan Ihya al-Mawat (Revitalisasi Tanah Mati):** Mendorong penanaman pohon, pembangunan gedung, dan sistem gotong royong untuk mengoptimalkan penggunaan tanah.
4. **Redistribusi Kekayaan:** Umar bin Abdul Aziz menyerahkan seluruh harta pribadi dan keluarganya kepada Baitul Mal, termasuk perkebunan di Suriah, Mesir, dan Hijaz yang menghasilkan sekitar 40.000 dinar per tahun. Khalifah Umar bin Abdul Aziz fokus pada kebijakan yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengurangi pajak untuk kaum Nasrani, menghapus pajak untuk umat Muslim, menetapkan aturan takaran dan timbangan yang adil, menghapus cukai dan kerja paksa, memperbaiki pertanian, menggali sumur, membangun jalan, menyediakan tempat penginapan untuk musafir, dan membantu fakir miskin (Ruslan and Marasabessy 2017).

Tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah

1. Mu'awiyah Bin Abi Sufyan

Sebagai pendiri Dinasti Umayyah, Mu'awiyah memperkenalkan beberapa inovasi administratif yang memperkuat infrastruktur ekonomi. Kontribusinya termasuk:

- Pendirian Diwan (kantor catatan) yang memperbaiki pengelolaan keuangan negara
- Pengembangan angkatan laut Islam yang mendukung perdagangan maritim
- Pembayaran tentara dengan upah tetap, menciptakan stabilitas ekonomi

2. Abdul Malik Bin Marwan

Abdul Malik bin Marwan dikenal karena reformasi ekonomi komprehensif yang mencakup:

- Penerbitan mata uang Islam pertama
- Pengembangan Diwan al-Barid (layanan pos)
- Pembatasan urbanisasi untuk menjaga stabilitas demografis
- Kebijakan pertanian dan perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi

3. Umar Bin Abdul Aziz

Meskipun masa pemerintahannya singkat (717-720 M), Umar bin Abdul Aziz meninggalkan dampak signifikan pada pemikiran ekonomi Islam:

- Penghapusan diskriminasi dalam sistem ekonomi
- Reformasi sistem zakat
- Perbaikan administrasi pemerintahan
- Kebijakan pertanian yang progresif
- Reformasi sistem kharaj dan jizyah yang lebih adil

Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Bani Umayyah

Penerapan prinsip syariah bertujuan menciptakan keseimbangan sosial, keadilan, dan kemakmuran ekonomi. Melalui zakat, wakaf, pengawasan pasar oleh negara, serta nilai-nilai etika seperti kejujuran dan larangan riba, sistem ini mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat (Rizka Nur Faidah¹, Rizma Okavianti², Putri May Maulidia³, Eva Putri Mulyani⁴ 2024).

1. Perdagangan

Ekspansi teritorial Dinasti Umayyah menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan perdagangan. Keamanan jalur darat dan laut memungkinkan pedagang Muslim melakukan perjalanan dagang hingga Cina melalui Jalur Sutra, membawa komoditas seperti sutra, keramik, obat-obatan, dan parfum. Jalur perdagangan maritim timur berkembang untuk perdagangan rempah-rempah, jamu, kesturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu. Basra di Teluk Persia tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai selama periode ini.

2. Pertanian dan Industri

Dinasti Umayyah memberikan perhatian besar pada pengembangan pertanian melalui:

- Pengembangan sistem irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian
- Diversifikasi tanaman komersial seperti gandum, beras, tebu, jeruk, dan kapas

- Dukungan terhadap industri tekstil dan kulit

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan sektor pertanian. Ia memperbaiki lahan pertanian, menggali sumur-sumur untuk irigasi, dan memastikan para petani mendapat dukungan agar hasil pertanian meningkat dan rakyat sejahtera (Huda 2021).

3. Reformasi Fiskal

Sistem perpajakan pada masa Bani Umayyah mengalami beberapa perubahan:

- Kharaj (pajak tanah) dikenakan pada semua pemilik tanah
- Jizyah (pajak kepala) hanya dikenakan pada non-Muslim
- Zakat dikelola sebagai instrumen redistribusi kekayaan
- Ushr (pajak perdagangan) mendukung pertumbuhan aktivitas komersial

Umar bin Abdul Aziz mengembangkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan keuangan negara, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya yang sudah ada secara efisien daripada meningkatkan beban pajak.

Umar bin Abdul Aziz tidak hanya membayar hak rakyat pada masa pemerintahannya, tetapi juga mengembalikan hak-hak yang pernah diambil secara zalim sebelumnya, hingga Baitul Mal di Irak kosong. Ia menghapus pungutan liar, pajak yang tidak perlu, dan biaya yang memberatkan rakyat. Ia juga membuka jalur perdagangan bebas untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini meringankan beban rakyat, membuat para pedagang kembali berdagang, dan meningkatkan jumlah barang yang dijual, sehingga potensi keuntungan pedagang pun ikut meningkat (Ian Rakhmawan Suherli et al. 2023).

4. Pembuatan Mata Uang

Reformasi moneter Abdul Malik bin Marwan pada tahun 77 H/697 M menandai langkah penting dalam sejarah ekonomi Islam:

- Penerbitan dinar emas dan dirham perak dengan desain Islami
- Penggunaan tulisan Kufi pada mata uang
- Penggantian mata uang Bizantium dan Persia dengan mata uang Islam

Standardisasi mata uang ini memperkuat persatuan ekonomi di seluruh wilayah kekuasaan Umayyah dan memfasilitasi perdagangan. Kemajuan ini begitu penting bagi Islam, karena dengan adanya mata uang yang sah menunjukkan persatuan yang mampu menciptakan stabilitas keamanan negara terjamin pada saat itu, sehingga berimbas pada perdagangan yang berputar secara lancar hingga akhirnya mampu meningkatkan perekonomian negara (Ummah 2019).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah menunjukkan upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun implementasinya tidak selalu konsisten dan menghadapi berbagai tantangan, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikembangkan pada masa ini memberikan fondasi penting bagi perkembangan sistem ekonomi Islam di masa berikutnya.

Beberapa kontribusi signifikan dari masa Dinasti Umayyah terhadap pemikiran ekonomi Islam meliputi: (1) pengembangan institusi fiskal seperti Baitul Mal; (2) standardisasi sistem moneter melalui penerbitan dinar dan dirham Islam; (3) pengembangan infrastruktur ekonomi yang mendukung perdagangan dan pertanian; dan (4) implementasi konsep negara kesejahteraan pada masa Umar bin Abdul Aziz.

Tantangan utama yang dihadapi sistem ekonomi Dinasti Umayyah termasuk ketegangan sosial akibat kebijakan pajak yang terkadang diskriminatif, ketidakmerataan distribusi kekayaan, dan penggunaan dana publik untuk kepentingan keluarga kerajaan. Faktor-faktor ini, bersama dengan konflik politik internal dan eksternal, berkontribusi pada kemunduran dan akhirnya keruntuhan dinasti ini.

Penelitian ini merekomendasikan studi lebih lanjut tentang aspek-aspek spesifik dari kebijakan ekonomi Dinasti Umayyah, terutama implementasi praktis prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks pemerintahan yang multikultural dan luas secara geografis. Pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan ekonomi pada masa ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer yang relevan dengan tantangan global saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Aravik, H., & Tohir, A. (2020). Perekonomian Pada Masa Dinasti Umayyah Di Andalusia; Sejarah Dan Pemikiran. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 81-98. <https://doi.org/10.56644/adl.v1i1.8>
- Fildayanti, D. (2021). *Konsep Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/m9pag>
- Hasibuan, S. W. (2020). Naskah Fa Pemikiran Ekonomi.
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135-148. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>

- Ihsan, N. A. (2014). Konsep Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah, Abbasiyah Dan Turki Utsmani. *90100119070*, 1-5.
- Huda, Muhammad Nurul. 2021. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah." *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 1(2):135–48. doi: 10.30998/je.v1i1.466.
- Ian Rakhmawan Suherli, Sofian Al-Hakim, Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, and Aip Syarifudin. 2023. "Menelisik Kebijakan Fiskal Di Masa Kejayaan Islam: Studi Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6(1):148–58. doi: 10.25299/syarikat.2023.vol6(1).10722.
- Kirani, Ratu, nova wildan Firmansyah, and erina helda Mariyah. 2023. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah." *Journal of Economics Bussines Ethic and Science Histories* 1(1):115–22.
- Lisa Aminatul Mukaromah. 2020. "Perkembangan Ekonomi Islam Era Klasik (Bani Umayyah Dan Bani Abbasiyah)." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*. 9(2):66–82.
- Maulidan, Aldi Cahya, Faishal Sahru Rhamadan, Devi Rahma, Universitas Pendidikan Indonesia, Abi Sufyan, Muhammad Saw, and M. Dia. 2024. "Sejarah Peradaban Bani Umayyah Dan Pengaruhnya Terhadap Penyebaran Islam Di Nusantara Tujuan Dari Artikel Ini Adalah Untuk Menjelaskan Sejarah Dinasti Bani Umayyah , Dimulai Dengan Masa Syam Dituturkan Dalam Banyak Hadits SWT , Syria Memang Memiliki Pesona Bani Umayyah Menggantikan Bani Hasyim Dan Memerintah Dari Tahun 661 Kekuasaan Mereka Untuk Mencakup Sejarah Peradaban Bani Umayyah Adalah Bagian Penting Dari Perkembangan Rasyidin (Rachman , 2018). Selama Berbagai Wilayah Yang Jauh Dari Pusat Kekuasaan Bani Umayyah Tidak Hanya Membawa Pengaruh Politik Dan Pengaruh Ini Adalah Nusantara , Yang Penyebaran Islam Di Nusantara . Salah Satunya Adalah Hubungan Perdagangan Timur Tengah Dan Penduduk Lokal . Umayyah Membawa Agama Dan Budaya." 11(September):159–80.
- Rizka Nur Faidah¹, Rizma Okavianti², Putri May Maulidia³, Eva Putri Muliyani⁴, Hikmah Luqiyah K⁵. 2024. "Indonesian Research Journal on Education." *Indonesian Research Journal on Education Web*: 4:550–58.
- AZIDNI ROFIQO, and FITRA RIZAL. 2019. "Economic Policy in Umayyah Era (Policy Success of Umar Ii and Failure of Governor of Nasar Bin Sayyar in Marwan Ii Era 744–750)." *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16(2):226–36. doi: 10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5832.
- Ruslan, Oleh ., and Husein Marasabessy. 2017. "Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah." *Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah* 18:132.
- Saputra, Muh Rustam. 2025. "E-ISSN : 2792-0876 Kebijakan Dan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah : " 6(1):11–12. doi: 10.37274/mauriduna.v6i1.1397.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Kebijakan Dan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah: Inspirasi Untuk Transformasi Ekonomi Masa Kini." *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.